

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Abdul Kadir, 2015, *Study Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*, CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Aisyah, Dara, 2003, *Hubungan Birokrasi dengan Birokrasi*, USU Digital Library, Diakses tanggal 30 November 2008.
- Alfian dan Nazaruddin Syamsyuddin, 1991, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Pustaka Utama Grafit, Jakarta.
- Baedhowi, 2004, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan; Study Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*. Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta.
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Edward III, George C. 1980, *Implementing Public Polyci*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Grindle, Merilee S, George C, 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Pressline, London-England.
- Hardijto, Dydiet, 1995, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, Raja Grafindo Persada.
- Jones, Charles, O, 1970, *An Introduction To The Study of Public Policy*, Wadsworth, Belmont, CA.
- Kaiman Turnip, 2016, *Prokontra dan Resistensi ITC/E-Gov Perspektif Psikologi Birokrasi*, Elmatara Yogyakarta
- Mazmanian, Daniel H., and Paul A. Sabatier, 1983, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York, Harper Collins.
- Nasution, 1998, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sastroatmodjo, Sudjono, 1995, *Partisipasi Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Sedarmayanti, 2000, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung.

- Siagian, Sondang, 1995, *Teori Pengembangan Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Suryono, Agus, 2003, *Budaya Birokrasi Pelayanan Publik*, Diakses tanggal 30 November 2008.
- Sutarto, 2002, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tarigan, Antonius, 2000, *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial; Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta. Raja Grafindo Perkasa.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Jakarta.
- Winarni, 2004, *Manajemen Perubahan (Management og Change)*, Prenada Media, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA

DATA INFORMAN :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

a. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah?
2. Apa saja yang menjadi pendukung peraturan-peraturan untuk mendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi?
3. Dengan terlaksananya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi, apa tujuan yang ingin dicapai?
4. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di Pemerintah Kabupaten Dairi terkhusus Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi?
5. Apakah implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi memenuhi kepentingan masyarakat?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang terlaksananya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah akan berimbas dengan perubahan terkait dengan ketatalaksanaan?
7. Apa saja yang mempengaruhi perubahan terkait Ketatalaksanaan dengan terlaksananya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah?

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap perubahan struktur yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap penetapan Tipe A pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Organisasi sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016?
10. Dengan perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, apakah seluruh kegiatan sudah berjalan dengan efektif dan efisien?
11. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, apakah formasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Dairi bertambah?

b. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi?
2. Apakah tim yang ditugasi memiliki kompetensi untuk merumuskan kebijakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, Dengan terlaksananya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adanya perubahan struktur organisasi yang erat kaitannya dengan SDM?
4. Apakah SDM atupun Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN?
5. Apakah komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi untuk jabatan fungsional umum telah sesuai dengan kebutuhan?
6. Apakah pihak Legislatif (DPRD) Kabupaten. Dairi mendukung pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 di Kabupaten. Dairi?

c. Komunikasi

1. Dalam pelaksanaan perumusan kebijakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adakah Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan tindakan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi?
2. Siapa aja yang berperan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi dilaksanakan?
4. Bagaimana konsultasi Tim Penyusun dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Kelembagaan Perangkat Daerah ?
5. Bagaimana konsultasi Tim Penyusun dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Kelembagaan Perangkat Daerah?
6. Hambatan apa saja yang dihadapi pada saat melaksanakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi?
7. Bagaimana konsultasi Tim Penyusun dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kelembagaan Daerah?
8. Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait penataan kelembagaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016?

d. Sikap Birokrasi

1. Apakah tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 telah memahami Tugas dan Kewenangannya?
2. Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bagaimana hubungan kedudukan, susunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah?

3. Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adanya penambahan Bagian pada Sekretariat Daerah, bagaimana hubungan penganggaran program kegiatan tersebut?
4. Apakah seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi telah memahami Tugas Pokok dan Fungsinya?
5. Apakah masing-masing tim sudah diberi kewenangan dalam hal pembentukan struktur organisasi ketatalaksanaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016?

